

KABAR DESA

VOL.2

SAJIKAN KABAR TERKINI TENTANG
DESA DI KALIMANTAN TIMUR

KEBIJAKAN PSBB : APA ITU

Hal.12

KABUPATEN/KOTA DIMINTA BERINOVASI
BUAT KONSEP PERSIAPAN MENUJU NEW
NORMAL

Hal.20

on his first time at NYFW

How one woman turned her
blog into a media empire



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Allah SWT, saat ini telah terbit buletin yaitu KABAR DESA, Sajikan Seluk Beluk Kabar Tentang Desa.



MOH. JAUHAR EFENDI

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN
DESA PROV. KALTIM

Kami mengharapkan melalui buletin ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan informasi dan komunikasi dengan seluruh Penggiat Desa dimanapun berada, khususnya untuk 841 Desa di Kalimantan Timur, sekaligus sebagai sarana komunikasi atau media untuk mendukung Penyebaran Informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik.

Dewan redaksi mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pegawai DPMPD Prov. Kaltim atas kontribusi yang besar sehingga buletin ini dapat terbit 3 bulan sekali

.Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada penulis yang telah berpartisipasi memberi kontribusi berupa berita yang termuat di www.dpmpd.kaltimprov.go.id

Akhir kata sebagai harapan kami, artikel dalam Buletin ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca dan segala kritik maupun saran untuk pengembangan dan kesempurnaan Buletin ini.



SECARA DARING, JAUHAR MONEV PERAN TPP DAN PENYALURAN DANA DESA

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim sebagai Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Satker P3MD) Kaltim mulai melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi (monev).

Monev dilakukan secara daring atau online menggunakan aplikasi zoom meeting bersama kepala DPMD kabupaten se Kaltim, Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) III Kaltim, serta para Tenaga Ahli (TA) P3MD Kabupaten se Kaltim, Kamis (2/4).

Dikatakan Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi monev dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan peran pendampingan TPP di tempat penugasan masing-masing, serta mendengarkan laporan progres penyaluran dana desa beserta kendala yang dihadapi.

Alhamdulillah berdasarkan laporan yang disampaikan, baik DPMD maupun TA sudah melaksanakan tugas dengan baik dalam mengawal pelaksanaan P3MD di daerah masing-masing. Hanya saja memang tidak dipungkiri masih terdapat permasalahan yang menjadi perhatian dan perlu campur tangan DPMD maupun TPP dalam melakukan percepatan penyaluran dana desa,” sebut Jauhar dihadapan 47 orang peserta pertemuan secara daring tersebut.

“Sebagai contoh, terkait kendala belum ditetapkan APBDes, DPMD maupun TPP diminta mendorong desa agar segera melakukan penetapannya. Pun demikian terkait belum terbitnya surat kuasa pemindah bukuan dari bupati, diharap ada interpersi DPMD agar dana desa bisa segera cair dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Selanjutnya desa yang dana desanya sudah salur diharap segera melakukan pencairan agar ada kegiatan perkembangan ekonomi masyarakat. Mengingat pada kondisi pandemi wabah COVID-19 seperti sekarang terjadi ketidak seimbangan ekonomi masyarakat.

“Meskipun seperti kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang sifatnya fisik belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena antisipasi pencegahan dan penanganan COVID-19,” sebutnya.

Terkait rapat jarak jauh sendiri, di mengaku akan mengagendakan rapat serupa dengan masing-masing kabupaten. Harapannya lebih banyak persoalan yang dapat dibahas diselesaikan bersama melibatkan DPMD dan TPP dari TA hingga Pendamping Lokal Desa.

Senada dengan itu Koordinator KPW Kaltim, Alwani berharap dukungan DPMD dan TPP menyelesaikan permasalahan yang menjadi penghambat penyaluran dana desa. Sebab penyaluran dana desa melewati beberapa tahap yang perlu perhatian bersama, yakni perbub, surat kuasa pemindah bukuan, penetapan APBDes.

“Seperti surat kuasa pemindah bukuan masih ada satu kabupaten di Kaltim yang belum bersama 130 kabupaten lain se Indonesia. Ini harus diselesaikan. Kalau bupati belum tanda tangan surat kuasa dana tidak bisa masuk ke rekening kas desa,”sebutnya sambil meminta dukungan DPMK Mahulu agar mengawal prosesnya untuk percepatan.

Pun demikian terkait belum ditetapkany APBDes. Alwani minta dukungan TA agar melakukan proses umpan balik pendampingan terhadap beberapa kabupaten yang desanya masih belum menetapkan APBDes.

Rapat sendiri dipandu Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Riani Tisnadewi dengan didampingi PPK Satker P3MD Kaltim, Isnawati yang juga Kasi Pembangunan Desa, Kasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, Esthi Susila Rini, Kasi Pengembangan Informasi Desa dan Kelurahan, Ahkmad Nahjani beserta Tim Satker P3MD Kaltim.(DPMPD Kaltim/arf)



Kepala Dinas melakukan teleconference via zoom dengan TPP



DPMPD TERAPKAN ABSENSI ONLINE BAGI TPP KALTIM

SAMARINDA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim sebagai Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kaltim disebut bakal menerapkan absensi online bagi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kaltim.

Absensi online dimaksudkan agar TPP tetap tercatat sedang melaksanakan tugas seperti biasa meskipun sedang bekerja dari rumah atau work from home.

"Seluruh TPP diminta absensi online setiap hari. Ini sebagai dasar satker membayar gaji TPP setiap bulannya," ujar Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat rapat monitoring dan evaluasi TPP dan progres penyaluran dana desa menggunakan aplikasi zoom meeting, Kamis (2/4).

Terkecuali daerah yang wilayahnya masih blankspot maupun yang jaringannya terbilang tidak stabil, tidak diwajibkan melakukan absensi online. Hanya saja, Tenaga Ahli kabupaten masing-masing bertanggung jawab melaporkan TPP pada desa mana saja yang tidak dapat melakukan absensi online.

Khusus bagi yang jaringannya tidak stabil, tetap diminta absen online menyesuaikan waktu saat jaringan baik. Disisi lain, Jauhar menyebut kebijakan bekerja dari rumah bukan berarti menjadi penghalang TPP turun lapangan. Mereka dipersilahkan tetap melakukan kunjungan jika dianggap perlu, tapi tetap memperhatikan aturan menggunakan masker, menjaga jarak aman berhubungan sosial, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun agar terhindar penyebaran COVID-19..

Sebagai penunjang, dia mengaku sudah menugaskan staf untuk membuat formulir aplikasi online yang link nya dapat diakses seluruh TPP.



Sementara Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Riani Tisnadewi meminta TPP tetap aktif menyampaikan laporan individu (lapindu) setiap bulannya, sebagai pertanggung jawaban kinerja melakukan pendampingan.

"Paling lambat setiap tanggal 5, lapindu setiap TPP sudah masuk di Satker P3MD, kecuali Mahulukita beri kelonggaran sampai tanggal 7 setiap bulannya. Ini penting agar proses pembayaran gaji lancar," serunya.

Untuk diketahui, kebijakan work from home atau bekerja dari rumah juga berlaku bagi TPP P3MD Kaltim.

Satker P3MD Provinsi Kaltim pada tanggal 16 Maret 2020, telah menerbitkan Surat Tentang Instruksi Pencegahan Penyebaran COVID-19, dan Surat Gubernur Kaltim tentang percepatan penyaluran Dana Desa tahun 2020.

TPP diminta tetap melaporkan kinerjanya dalam melaksanakan pendampingan desa baik tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa meskipun bekerja dari rumah, diantaranya terkait tanggung jawab kinerja kunjungan 15 hari ke desa, kecamatan, atau OPD meskipun pembinaan dan pengendalian melalui jarak jauh. (DPMPD Kaltim/arf)



DAERAH DIMINTA DORONG REVISI APBDES UNTUK

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19

SAMARINDA - Setiap daerah di Indonesia diminta mendorong desa melakukan revisi terhadap APBDes untuk mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan Virus Corona atau COVID-19 di tingkat desa.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PMD Kemendes PDTT), M Fachri menyebut hal tersebut sesuai Surat Edaran Kemendes PDTT No. 8/2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

“Secara prinsip surat edaran tersebut menginstruksikan agar Dana Desa digunakan untuk pencegahan dan COVID-19 dan penegasan kembali Padat Karya Tunai Desa (PKTD),” sebut M Fachri saat menggelar rapat koordinasi bersama Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPK Satker P3MD) se Indonesia secara daring melalui fasilitas aplikasi zoom meeting, Rabu (1/4) siang.

Maksudnya, dalam penetapan APBDes harus dilakukan penyesuaian anggaran untuk berbagai kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Menurutnya semua kegiatan desa berkaitan pencegahan dan penanganan COVID-19 boleh dianggarkan menggunakan Dana Desa.

Diantaranya untuk biaya operasional pembentukan relawan pencegahan dan penanganan Virus Corona atau COVID-19 di tingkat desa atau relawan desa tanggap COVID-19.



Mengingat seiring laju penyebaran COVID-19, pemerintah menyarankan relawan desa tanggap COVID-19 menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kasus penyakit infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan tersebut.

Sedangkan terkait PKTD, sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo pelaksanaan PKTD dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan daya beli masyarakat, karena sejak wabah COVID-19 daya beli masyarakat sangat tertekan.

“Makanya tetap diutamakan PKTD agar daya belinya meningkat dan ekonomi masyarakat tetap berputar,” sebutnya.

Terkait kebijakan tetap di rumah atau bekerja dari rumah, PKTD tetap bisa dilakukan diantaranya dengan melaksanakan kegiatan pembuatan masker dan handsanitizer yang saat ini terjadi kelangkaan di lapangan.

“Libatkan masyarakat miskin sebagai pekerjanya agar dapat upah, sehingga ekonomi masyarakat desa tetap berputar,” katanya.(DPMPD Kaltim/arf)



KPW RILIS DANA DESA

BARU SALUR DI 300 DESA

SAMARINDA – Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) III Kaltim merilis progres penyaluran Dana Desa Tahap I tahun 2020. Dari 841 desa se Kaltim, baru 300 desa yang Dana Desa Tahap I nya sudah salur dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) Dikatakan Koordinator KPW III Kaltim, Alwani desa-desa yang sudah salur dimaksud tersebar di empat kabupaten dari tujuha kabupaten se Kaltim. Rinciannya Kabupaten Kutai Kartanegara 165 desa dari 193 desa, Paser 124 desa dari 139 desa, Penajam Paser Utara 5 desa dari 30 desa, serta Berau 6 kampung dari 100 kampung.



“Ini data terkahir sampai siang ini. Paling terakhir masuk Kutai Kartanegara. Awalnya malam tadi ada 31 desa dan sekarang bertambah menjadi total 165 desa yang sudah salur,” sebut Alwani saat mengikuti rapat monitoring dan evaluasi menggunakan aplikasi zoom meeting, Kamis (2/4).

Menurut Alwani desa harus melakukan percepatan proses penyaluran dana desa. Segera menyelesaikan tahapan dan persyaratan yang dibutuhkan agar bisa segera cair, karena idealnya desa sudah bisa mengusulkan pencairan tahap II.

Karenanya, dia berharap dukungan DPMD kabupaten maupun Tenaga Pendamping profesional memaksimalkan peran pembinaan dan pendampingan agar desa bisa melakukan percepatan penyalurana dana desa.

Kemudian bisa segera melakukan pencairan merealisasikan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk dalam kegiatan tanggap COVID-19.

Terlebih bagi desa yang belum menetapkan APBDes, Alwani berharap pendampingan bisa lebih dioptimalkan.

“Berdasarkan catatn kita Paser dari 139 desa masih ada 1 desa belum menetapkan APBDes, Berau dari 100 kampung masih ada 72 kampung belum, PPU dari 30 desa masih 25 desa yang belum, Kutai Kartanegara dari 193 desa masih 30 desa belum, Kutai Timur dari 139 desa 48 desa belum, Kutai Barat dari 190 kampung 87 kampung belum, dan Mahulu dari 50 kampung semuanya belum menetapkan APBDes,” sebutnya.(DPMPD Kaltim/arf)





MANAJEMEN RS MENGHADAPI COVID - 19

Kata Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) baru kita kenal pada akhir Tahun 2019. Bahkan, saat ini orang desa pun tahu kata covid-19, walaupun mungkin tidak semuanya tahu kepanjangan dari covid-19. Sebenarnya kata virus itu sendiri sudah lama kita kenal. Covid-19 ini baru mencuat setelah warga di Kota Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei, Cina, terserang virus tersebut. Virus ini menjadi sangat populer, karena menyebabkan kematian ribuan orang di seluruh dunia. Hingga kemarin (5/4/2020), penyebaran virus corona terus meluas. Sebanyak 207 negara mengonfirmasi terjangkit Covid-19 (covid19.go.id). Diakses tanggal 5 April 2020, pukul 22.04 wita).

Sebanyak 1,19 juta orang terkonfirmasi positif virus corona, 64.580 orang meninggal dunia, dan 246.110 pasien sembuh (kompas.com., 5 April 2020)/ Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan data per tanggal 5 April 2020, sudah ada 2.273 terkonfirmasi positif terinfeksi covid-19, 198 orang meninggal dunia, dan 164 orang dinyatakan sembuh (covid19.go.id). Diakses tanggal 5 April 2020, pukul 22.07 wita).

Di wilayah Provinsi Kaltim menduduki urutan ke 8 dari 32 provinsi yang sudah terjangkit. Dua provinsi yang tidak atau belum terjangkit adalah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data yang dirilis tanggal 5 April 2020, pukul 12.00 Wita, ada 25 orang positif terkonfirmasi virus corona. Dari jumlah tersebut 1 orang diberitakan meninggal. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) adalah warga dari Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, ada berita yang cukup menggembirakan yaitu 2 orang PDP positif terkonfirmasi covid-19, yang dirawat di RSUD Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) dinyatakan sembuh. Rumah Sakit ini statusnya adalah milik Pemerintah Prov. Kaltim, walaupun lokasinya berada di Kota Balikpapan.

Dalam menghadapi wabah pandemi covid-19 dan di tengah keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD) serta situasi kepanikan yang dihadapi masyarakat, maka diperlukan manajemen Rumah Sakit yang andal. Kenapa? Karena Rumah Sakit lah benteng terakhir penanganan atau penyembuhan orang yang sudah positif terkonfirmasi covid-19.

Cerita kesembuhan 2 orang pasien yang positif terkonfirmasi covid-19 dan dirawat di RSKD inilah yang mendorong penulis ingin menjelaskan tentang bagaimana manajemen RSKD yang saat ini dikomandani oleh dr. Edy Iskandar, Sp.PD bersama lebih dari 1.250 orang bisa memberikan pelayanan terbaik dan memberikan bukti nyata, bahwa pasien covid-19 bisa sembuh. Selain itu, penulis juga memberikan apresiasi kepada jajaran manajemen RSUD Taman Husada, Bontang dan jajaran manajemen RSUD Aji Muhammad Parikesit, Tenggarong. Keduanya juga telah membuktikan diri bisa merawat dan menyembuhkan pasien covid-19, masing-masing 1 orang.

Tulisan berikut ini, penulis hanya mengupas tentang manajemen RSKD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dulu ada satu lagi Rumah Sakit milik Pemprov Kaltim yang berlokasi di luar Ibukota Samarinda, yaitu Rumah Sakit Tarakan. Saat ini telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

RSKD berlokasi di Jalan M.T. Haryono, Balikpapan. Mulai dibangun Tahun 1991/1992 sampai dengan 1994/1995, di atas tanah 24,2 hektar (Ha). Dana berasal APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Timur. Luas bangunan RSKD ini awalnya seluas 15.277 m². Gedung RSKD ini mulai digunakan Tahun 1997. Tepatnya mulai tanggal 21 April. Peresmian dilakukan oleh Presiden kedua RI, yaitu Presiden Soeharto, pada tanggal 19 Agustus Tahun 1997.

Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman serta jumlah pasien yang ditangani terus mengalami peningkatan, maka dilakukan pengembangan pembangunan. Gedung Anggrek Hitam, 8 lantai, dilengkapi dengan helipad dimulai pembangunannya pada tahun 2011. Peresmian Gedung Anggrek Hitam pada tanggal 22 Maret 2013 oleh Menteri Kesehatan RI, dr. Andi Nafsiah Walinono Mboi, Sp.A.

Luas tanah RSKD saat ini mengalami pengurangan, karena 2,5 Ha dihibahkan kepada Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan. Total luas tanah saat ini mencapai 21,7 Ha. Hingga kini seluruh bangunan berdiri di atas lahan kurang lebih 10 Ha. Sisanya, seluas 11,7 Ha merupakan lahan hijau dan lahan kota.

RSKD ini memiliki sumber daya manusia (SDM) yang jumlahnya luar biasa banyak. Ada 33 dokter umum, 50 dokter spesialis, 4 dokter sub spesialis, 1 orang dokter gigi, dan 3 orang dokter spesialis gigi. Rumah Sakit ini juga didukung oleh 541 tenaga perawat, dan 67 bidan. Selain itu, juga didukung oleh 166 tenaga kesehatan lainnya, seperti farmasi klinis, apoteker, asisten apoteker, analis kesehatan, bank darah, radiografer, perekam medis, fisioterapis, terapi wicara, okupasi terapis, elektromedik, nutrisi, dan refraksi optisien

Tentu saja, seluruh aset SDM ini akan menjadi sebuah kekuatan andal jika dikelola dengan baik dan profesional. Dinahkodai oleh Direktur dan 28 pejabat struktural dan dukungan 359 orang fungsional umum/non-medis. Jangan dianggap remeh tenaga fungsional umum ini. Bayangkan, jika seorang dokter sedang melakukan tindakan operasi, kemudian tiba-tiba supply listrik dari PLN mengalami gangguan, maka staf fungsional umum yang memiliki keahlian untuk mengoperasikan genset atau generator menjadi penting untuk menyelesaikan kegiatan tindakan operasi. Di sinilah letak uniknya manajemen Rumah Sakit. Seorang manajer atau Direktur Rumah Sakit harus mampu dan memahami seluruh tugas pokok SDM yang berada di bawah kendalinya dan memastikan semuanya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Menurut Direktur RSKD, pada kondisi darurat penanganan wabah covid-19, RSKD telah menyiapkan 2 ruangan, yaitu Ruang Soka dan Ruang Mawar. Ruang ini memiliki 20 kamar. Ruang ICU disiapkan 4 tempat tidur. Untuk kasus PDP (pasien dalam pengawasan) dalam 1 kamar hanya ada 1 tempat tidur. Tidak boleh digabung. Sedangkan untuk pasien positif corona bisa digabung dalam 1 ruangan. Ada yang memiliki 4 kamar tidur dan ada yang 2 tempat tidur.

Lebih lanjut dijelaskan, "untuk yang satu keluarga positif corona digabung dalam satu kamar. Saat ini telah dipersiapkan untuk penambahan ruang perawatan covid-19, yaitu Ruang Kemuning dan Ruang Melati". Menurut penulis, langkah penyiapan ini adalah langkah antisipatif, mengingat masih banyaknya orang yang berstatus ODP maupun PDP

Berdasarkan laporan yang penulis terima, Tim Covid-19 sejak tanggal 13 Maret 2020 sudah tinggal di Wisma RSKD. Ada 45 orang perawat yang tinggal di wisma tersebut. Ini adalah bentuk kesadaran dari petugas Tim Covid-19 RSKD demi kesiapan pelayanan dan perawatan. Sekaligus untuk mencegah/memutus rantai penyebaran Covid-19.



Secara rendah hati, manajemen RSKD, khususnya Direktur RSKD memberikan dukungan penuh (total support) langkah tersebut, sehingga dibuatlah kebijakan resmi, agar Tim Medis Covid-19 tidak ada yang pulang ke rumah masing-masing. Ketika penulis bertanya tentang hal apa yang paling berat dihadapi dalam kasus corona, dr. Edy Iskandar, Sp.PD menjelaskan, adalah bila tidak ada Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap dan memadai serta memenuhi standar yang telah ditetapkan. Lebih jauh dijelaskan, syukur alhamdulillah RSKD sudah memenuhi kebutuhan tersebut, ditambah bantuan Pemerintah dan masyarakat yang ikut memberikan donasi APD dan lain-lain kepada Tim Medis Covid-19 RSKD.

Tantangan berat yang lain adalah reaksi awal pasien yang dirawat. Mereka merasa kebebasannya dibatasi. Biasanya diperlukan waktu antara 2 – 3 hari baru mereka bisa lebih tenang dan beradaptasi dengan lingkungan ruang perawatan. Di sinilah letak strategisnya kehadiran peran petugas medis covid-19. Para petugas memberikan support, membuat tulisan-tulisan motivasi di piring makan para pasien. Semua ini dimaksudkan untuk menyemangati para pasien, memberikan hiburan, juga kejutan-kejutan yang menurut mereka kalau di luar ruang perawatan adalah hal biasa. Namun saat mereka berada di ruang perawatan menjadi hal yang luar biasa.

Menurut penulis sentuhan-sentuhan yang bersifat psikis ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap kekuatan fisiologis. Edy Iskandar menambahkan, hal berat lainnya adalah menata hati para petugas medis Covid-19, supaya bisa meredakan rasa kangen terhadap anak-anak yang lucu di rumah dan keluarga tercinta. Mereka juga ikut berkorban, karena tugas yang mulia ini. Ini adalah ongkos sosial (social cost).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan support penuh atas penanganan Covid-19. Manajemen RSKD telah melakukan koordinasi yang baik dengan Gugus Tugas Covid-19 tingkat Provinsi maupun tingkat Kota Balikpapan. Begitu juga dengan RSUD A. Wahab Sjastrane Samarinda maupun Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda juga melakukan koordinasi yang sama, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat Kota Samarinda. Diharapkan dengan keterlibatan banyak pihak mampu menuntaskan pandemi covid-19.

Untuk diketahui, RSKD maupun RSUD Abdul Wahab Sjastrane (RSUD AWS) Samarinda telah dua kali menerima penghargaan tertinggi untuk penilaian Rumah Sakit, yaitu penghargaan Bintang 5 dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Penilaian ini dilakukan setiap 3 tahun sekali. Begitu juga RSJ Atma Husada Mahakam juga pernah mendapatkan penghargaan bintang 5. Dengan reputasi seperti ini dan koordinasi dengan para pihak kiranya dapat mendorong masyarakat untuk tidak percaya dan tidak ikut menyebarkan informasi dan berita hoax di tengah-tengah pandemi global ini.

Ketika penulis minta pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada keluarga pasien covid-19, Direktur RSKD menyampaikan "agar keluarga tetap tenang, tetap di rumah. Budayakan hidup bersih dan sehat. Makan makanan bergizi, berolahraga, dan percayakan perawatan dan pengobatan keluarga yang dirawat di RSKD kepada Tim Medis. Berikan dukungan dan semangat walaupun dari rumah".

Sedangkan untuk masyarakat, "jaga keluarga masing-masing. Tetap berdiam diri di rumah. Jangan ke luar rumah bila tidak ada keperluan yang mendesak. Hindari tempat-tempat keramaian. Minimalkan berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Jaga kondisi. Makan dan minum yang bergizi. Cukup istirahat. Olahraga ringan. Tambah suplemen seperti madu dan vitamin. Jaga kebersihan lingkungan. Sering cuci tangan. Lakukan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat (GERMAS). Jangan lupa pakai masker ketika ke luar rumah.

Moga wabah pandemi covid-19 segera berlalu dari Bumi Indonesia pada umumnya dan Kaltim pada khususnya. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Selamat bertugas para pahlawan di bidang kesehatan.*

Oleh :
Moh. Fauhar Efendi

Plt. Asisten Pemerintahan dan
Kesra Sekda Provinsi
Kaltim. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Prov.
Kaltim





2.960 MAHASISWA UNMUL AKAN IKUTI

KKN KLB

SAMARINDA -- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman (LP2M Unmul) Samarinda menyiapkan pelaksanaan program pengabdian masyarakat Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan cara baru berupa Kuliah Kerja Maya (KKM). KKN Kondisi Luar Biasa (KLB) tersebut diperuntukan bagi sebanyak 2.960 peserta KKN Unmul Angkatan 46 tahun 2020.

Plh Kepala LP2M Unmul Samarinda, Anton mengaku sedang menyusun pedoman pelaksanaan KKN KLB tersebut sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. "Sudah kita siapkan pedomannya. Jadi untuk kondisi pandemi wabah COVID-19 ini tidak lagi KKN, tapi KKM," sebut Anton saat rapat persiapan pelaksanaan KKN Unmul Angkatan 46 tahun 2020, di Ruang Rapat Kantor DPMPD Kaltim, Kamis (9/4).

Pelaksanannya tidak sama seperti pengabdian masyarakat program KKN tahun-tahun sebelumnya yang seluruh pesertanya didistribusikan ke desa-desa. Melainkan penyelenggaraan KKN dilaksanakan dengan model alternatif yang menyerupai kegiatan-kegiatan yang dapat disetarakan sebagai KKN.

Hanya saja peserta KKN tidak langsung terjun lapangan, hanya dilakukan melalui dunia maya. Kunjungan lapangan jika dibutuhkan tetap diperbolehkan untuk satu kali.

Karenanya lokasi pelaksanaan KKN KLB harus desa yang dapat diakses jaringan internet untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. "Sebab komunikasi peserta KKN dengan masyarakat dilakukan secara jarak jauh menggunakan media sosial maupun jalur telepon dan pesan singkat," sebutnya.

Diakui pelaksanaan KKN KLB ini membawa hikmah dalam pelaksanaan KKN Unmul. Sebab biasanya beberapa fakultas melaksanakan KKN sendiri tidak dikoordinir LP2M Unmul, dengan kondisi pandemi wabah COVID-19 seluruh kegiatan KKN dikoordinir LP2M Unmul.



Menurutnya, kebijakan penyesuaian pelaksanaan KKN dengan pertimbangan informasi Pembatasan Sipil Berskala Besar (PPSB) berbagai wilayah sesuai kebijakan masing-masing kepala daerah dan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap pergerakan mahasiswa ke desa-desa.

Sementara KKN menurut Peraturan Akademik adalah wajib untuk ditempuh semua mahasiswa S1 di Universitas Mulawarman, sehingga KKN harus dilaksanakan sehingga jika keadaan tidak memungkinkan maka model KKN yang akan diganti.

Berdasarkan pertimbangan keselamatan dan kedaruratan, maka pada tahun 2020 kebijakan yang diambil adalah KKN Kondisi Luar Biasa dan penyetaraan KKN. Pelaksanannya dijadwalkan Juli – Agustus 2020.

Untuk menghindari penumpukan peserta, LP2M Unmul tetap akan melaksanakan program KKN pada tahun 2020 dan memulai proses pendaftaran di bulan April 2020. Dan saat ini sedang dilaksanakan Revisi Panduan KKN Kondisi Luar Biasa dan Penyetaraan KKN.

Mengikapi itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi menyarankan LP2M Unmul segera mengagendakan rapat virtual dengan kabupaten/kota perihal informasi pelaksanaan KKN KLB dimaksud. "Saat rapat bisa disampaikan perubahan pola KKN. Dan minta dukungan data desa mana yang akan disasar, khususnya yang sudah dapat diakses internet," sebutnya.

Menurutnya, penerapan KKN KLB merupakan langkah maju dalam penyelenggaraan pendidikan. Dia mengaku mendukung selama pelaksanannya memenuhi persyaratan Dikti.

Pada kesempatan itu dia berpesan agar nantinya peserta KKN dapat menginventarisir permasalahan desa. Dari 2.960 peserta akan dihasilkan laporan permasalahan desa sejumlah 2.060 masalah jika setiap peserta mengidentifikasi satu masalah.

"Ini akan mempermudah DPMPD dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa," sebutnya.(DPMPD Kaltim/arf)



2.960 MAHASISWA UNMUL AKAN IKUTI KKN KLB

SAMARINDA - Sebanyak 341 desa dari 841 desa se Kaltim disebut sudah melaksanakan Surat Edaran Kemendes PDTT No8/2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa membentuk Relawan Desa Tanggap COVID-19 dengan anggota 9.044 orang relawan.

"Rinciannya Kabupaten Paser sebanyak 60 desa dari 139 desa dengan jumlah relawan 1.380 orang, Kukar 109 desa dari 193 desa dengan jumlah relawan 3.764 orang, dan Kabupaten Berau 15 desa dari 100 desa dengan jumlah relawan 307 orang," sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat merilis data Desa Tanggap COVID-19, Kamis (9/4).

Dana tersebut diperuntukan membangun 205 pos tim relawan, 72 kegiatan pendirian tempat isolasi, pelaksanaan sosialisasi hidup sehat lawan COVID-19 sebanyak 305 kali, dan penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat publik sebanyak 268 kegiatan.

Kemudian penyemprotan disinfektan sebanyak 332 kegiatan, pendataan pemudik sebanyak 229 kegiatan, pendataan masyarakat rentan sakit 118 kegiatan, pengadaan masker bagi warga 86 kegiatan, dan kegiatan lain-lain yang berkenaan dengan aksi tim Desa lawan COVID-19 sebanyak 100 kegiatan. (DPMPD Kaltim/arf)

REKAP IDENTIFIKASI DESA LAWAN COVID 19 TINJAU SE MENDES 8/2020
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CUT OFF : Hari Kamis, Tanggal 09 April 2020

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA TAHUN 2020 (Rp.)	DD UNTUK LAWAN COVID-19 (Rp)	Sudah ada Nomer SK Tim Relawan	Jumlah Relawan	Sudah	Belum	Pendirian Pos Tim	Pendirian tempat isolasi	socialisasi hidup sehat/lawan covid-19	Penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat publik	Penyemprotan disinfektan	Pendataan Pemudik/Pendataan	Pendataan Masyarakat Rentan Sakit	Pengadaan masker bagi warga	Kegiatan Lain-lain yang berkenaan dengan aksi tim Desa Lawan Covid-19 (Sebutkan)
1	Paser	10	139	126.720.147.000	244.240.000	60	1.380	60	79	12	6	72	70	48	45	38	8	2
2	Kutai Kartanegara	16	193	187.633.528.000	5.335.090.470	109	3.764	109	84	108	44	127	99	135	95	49	44	48
3	Berau	12	100	116.218.996.000	255.395.506	15	307	15	85	19	-	8	15	27	45	4	-	11
4	Kutai Barat	16	190	179.976.813.000	1.580.954.550	84	2.170	84	127	39	22	55	35	65	29	27	28	38
5	Kutai Timur	18	139	181.445.486.000	1.667.607.220	39	655	39	111	15	-	27	27	27	13	-	6	-
6	Penajam Paser Utara	4	30	36.814.579.000	748.973.612	30	608	30	18	-	-	12	12	12	-	-	-	1
7	Mahakam Ulu	5	50	78.166.630.000	78.000.000	4	160	4	46	12	0	4	10	18	2	0	0	0
JUMLAH				906.976.179.000	9.905.461.342	341	9.044	341	550	205	72	305	268	332	229	118	86	100

Kemudian dilanjutkan Kutai Barat 84 desa dari 190 desa dengan jumlah relawan 2.170, Kutai Timur 39 desa dari 139 desa dengan jumlah relawan 655, Penajam Paser Utara 30 desa dari 30 desa dengan jumlah relawan 608 orang, dan Mahakam Ulu 4 desa dari 50 desa dengan jumlah relawan 160.

Sedangkan dana desa yang diperuntukan melawan COVID-19 yang terdata hingga Kamis (9/4) siang sebesar Rp9,905 milyar.

Terbesar di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai Rp5,335 miliar, disusul Kutai Timur sebesar Rp1,667 milyar, dan Kutai Barat Rp1,580 miliar.



TEMUI WALIKOTA RIZAL, JAUHAR BAHAS KEMUNGKINAN PENUNDAAN

PERHELATAN HKG PKK KE 48

BALIKPAPAN -- Rencana perhelatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) ke 48 bakal ditinjau ulang.

Seiring kebijakan penundaan kegiatan melibatkan orang banyak, kegiatan berkumpulnya kader PKK se Kaltim tersebut diisyaratkan juga bakal ditunda pelaksanaannya.

"Itu mendasari kita menemui Pak Walikota, Rizal Efendi. Membahas kepastian pelaksanaannya. Bersedia ditunda pelaksanaannya hingga kondisi pandemi COVID-19 berakhir, setidaknya pada tahun depan," ujar Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat berbincang dengan Walikota Balikpapan, Rizal Efendi, di Balikpapan, Senin (13/4).

Pemprov menunggu keputusan Pemkot Balikpapan. Jika surat keputusan penundaan pelaksanaannya terbit, Pemprov Kaltim akan menindaklanjuti membuat surat penundaan Gubernur Kaltim yang ditujukan untuk kabupaten/kota se Kaltim.

Seperti diketahui HKG PKK ke 48 dijadwalkan dilaksanakan 14-16 April 2020, di Kota Balikpapan. HKG PKK akan dirangkai dengan Kegiatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) ke XVII, dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke VII Tingkat Provinsi Kaltim dengan dihadiri ribuan peserta.

Walikota Rizal Efendi saat ditemui ditemani Asisten I Sekkot Balikpapan, Syaiful Bahri, Asisten II, M Noor, dan Asisten III Dahniar, dan Kabag Kesra Setkab Balikpapan, Sugianto.

Sementara Jauhar berkunjung didampingi Kepala DPMPD Kaltim yang diwakili Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy, Isnaini Trikorawati dan Kasi Pemberdayaan Kelembagaan, Evida Praseningrum.(DPMPD Kaltim/arf)

Menurut Jauhar secara prinsip Walikota Balikpapan sependapat menunda kegiatan yang sedianya dilaksanakan 14-16 April 2020.

Pemkot Balikpapan akan membahas lebih lanjut untuk penyelesaiannya, jika memang positif ditunda ditindaklanjuti penerbitan surat penundaan Walikota Balikpapan.





DESA TUNJUKAN KOMITMEN IKUT BERPERAN

PENANGANAN COVID-19

SAMARINDA -- Desa-desanya disebut sudah menunjukkan komitmen ikut berperan membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Kaltim.

Sebagian besar desa Kaltim tercatat telah menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri PDTT No 8/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan penegasan Padat Karya Tunai Desa serta Surat Gubernur Kaltim kepada Bupati tanggal 26 Maret 2020 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa.

"Dari 841 Desa di Kaltim, tercatat sudah teralokasi Dana Desa untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp13.983.574.715," sebut Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat merilis data penanganan COVID-19 desa per 13 April 2020 pukul 17.00 Wita, Selasa (14/4).



Dia tidak merinci besaran dana tersebut tersebar di berapa desa dan desa mana paling besar mengalokasikan anggaran dari 841 desa se Kaltim.

Pun demikian untuk Pembentukan Tim Desa lawan COVID-19. Setidaknya sudah ada sebanyak 470 desa membentuk Tim Desa lawan COVID-19 dan semuanya sudah menerbitkan SK Tim.

Tim terdiri dari 14.866 orang relawan yang menjadi garda terdepan di tingkat desa setelah tenaga medis dan pihak keamanan dalam penanganan COVID-19.

"Mereka bahkan sudah mulai aksi diantaranya Pendirian Pos Tim 357 desa, Pendirian Tempat Isolasi 117 desa, sosialisasi Hidup Sehat/lawan COVID-19 456 desa," sebutnya.

Selanjutnya Penyediaan Tempat Cuci Tangan 379 desa, Penyemprotan disinfektan 452 desa, Pendataan pemudik/pendatang 321 desa, Pendataan masyarakat rentan sakit 210 desa, serta Pengadaan masker bagi warga 141 desa.

"Semoga perannya bisa dirasakan masyarakat. Membantu pemerintah mengantisipasi masuknya wabah COVID-19 di desa," sebutnya. (DPMPD Kaltim/MJE/arf)





KEBIJAKAN PSBB: APA ITU?

Oleh : Oleh : Dr. Moh. Jauhar Efendi, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekda Provinsi Kaltim.

SAMARINDA - Dulu sebelum ada kasus Covid-19, istilah PSBB cukup lama dipakai di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Agama. Tetapi waktu itu kepanjangan PSBB adalah Pusat Sumber Belajar Bersama.

Walaupun istilah tersebut sudah lama dipakai, namun tidak seviral kebijakan PSBB yang ada sekarang ini.

Munculnya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) adalah sebagai upaya lanjutan dari pencegahan merebaknya wabah pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019).

Berikut ini penulis mencoba menjelaskan serba sedikit tentang kronologis lahirnya kebijakan PSBB serta mengupas tentang apa yang dimaksud dengan PSBB.

Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk mengajukan PSBB. Ruang lingkup PSBB serta kewajiban dan konsekuensi ditetapkan kebijakan PSBB

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa dampak penyebaran Covid-19 ini memang luar biasa.

Hal ini bisa dipahami, karena Covid-19 oleh World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia telah ditetapkan sebagai wabah pandemi global.

Hingga saat ini (13/4), tercatat kasus virus corona di seluruh dunia sebanyak 1.846.680 orang.

Jumlah kematian 114.090 orang (6,18%), dan yang sembuh ada 421.722 orang atau 22,84 persen (lihat www.kompas.com. Diakses tanggal 14 April 2020, pukul 11.01 wite).

Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan penjelasan juru bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, per tanggal 13 April 2020, total sudah 4.557 orang terkonfirmasi positif terinfeksi covid-19. Ada penambahan 316 orang kasus baru dibandingkan sehari sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, pasien yang meninggal dunia sebanyak 399 orang, dan 380 orang dinyatakan sembuh (kompas.com. Diakses tanggal 14 April 2020, pukul 11.13 wite).

Berdasarkan data per tanggal 13 April 2020, jumlah pasien di Kalimantan Timur yang positif terkonfirmasi covid-19 sebanyak 35 orang. Pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 6 orang, dan yang meninggal dunia 1 orang.

Berkaitan dengan penanganan penyebaran covid-19 di Indonesia, sudah banyak kebijakan yang diterbitkan.

Beberapa Kementerian (sebut saja Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan lain sebagainya) telah menerbitkan sejumlah aturan, mendahului terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020.

PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

PERPPU ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020. Berisi 5 Bab. Bab I Ruang Lingkup; Bab II Kebijakan Keuangan Negara; Bab III Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan; Bab IV Ketentuan Sanksi; dan Bab V Penutup.



KEBIJAKAN PSBB: APA ITU?

PERPPU tersebut terdiri atas 29 pasal.

Masih pada tanggal yang sama, yaitu 31 Maret 2020, Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Pemerintah (PP) ini hanya berisi 7 (tujuh) pasal.

Dalam diktum mengingat disebutkan rujukan PP tersebut adalah pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, juga UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pada pasal 1 PP Nomor 21 Tahun 2020, dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan PSBB adalah "pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Selanjutnya pada pasal 2 PP dimaksud ditegaskan bahwa daerah yang menetapkan kebijakan PSBB harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan.

Jika sudah disetujui oleh Menteri Kesehatan, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota.

Sedikitnya ada 2 (dua) kriteria yang harus dipenuhi jika daerah menginginkan diberlakukannya kebijakan PSBB, yaitu (1) jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; (2) terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Setidaknya PSBB meliputi 3 (tiga) hal.

Pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja; (2) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau (3) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan tersebut harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.

Selain itu, juga harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, seperti pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.

Pemerintah melalui PP ini mengingatkan kepada Pemerintah Daerah bahwa dalam penetapan kebijakan PSBB harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Kesehatan sebelum menetapkan kebijakan PSBB terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Selain mekanisme melalui jalur usulan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk penetapan kebijakan PSBB, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga dapat mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu (lihat pasal 6 PP Nomor 21 Tahun 2020).

Selain menerbitkan PERPPU Nomor 1 dan PP Nomor 21 Tahun 2020, masih pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 31 Maret 2020, Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



KEBIJAKAN PSBB: APA ITU?

Keppres ini hanya berisi dua hal, yaitu (1) Menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; (2) Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi atau penerapan kebijakan PSBB ini di daerah pertama kali oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 6 April 2020 untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keputusan ini atas usulan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Mulai berlaku efektif tanggal 10 April 2020. Rujukan keputusan PSBB adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Beberapa daerah lain sudah mengusulkan untuk mengajukan kebijakan PSBB. Tetapi tidak semua daerah disetujui. Ada 10 daerah yang sudah disetujui. Selain Prov. DKI Jakarta, adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Pekanbaru. Ada 5 (lima) daerah ditangguhkan dan beberapa daerah lain akan mengajukan permohonan kebijakan PSBB.

Bagaimana dengan Kaltim? Kita serahkan usulan tersebut dari Bupati/Walikota, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan segala konsekuensi kebijakan yang menyertainya.

Mari kita sempurnakan ikhtiar untuk mencegah penyebaran Covid-19, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga wabah pandemi Covid-19 ini segera berlalu untuk memulai kehidupan yang normal kembali seperti sediakala. Aamiin.



DIAPRESIASI, DESA MARGO MULYO SUDAH SALURKAN

BLT DANA DESA

SAMARINDA -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi memberi apresiasi atas langkah cepat Desa Margo Mulyo, Kecamatan Rantau Pulung, Kutai Timur yang sudah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Desa Margo Mulyo terbelang terdepan menyalurkan bantuan bagi warga miskin pedesaan terdampak COVID-19 di saat masih banyak desa lain yang belum menyelesaikan proses penyalurannya.

"Hebat. Cukup memahami banyaknya regulasi yang mengatur baik terkait prioritas penggunaan Dana Desa, maupun terkait mekanisme penyaluran BLT Dana Desa sehingga sudah bisa salur," ujar Moh Jauhar Efendi saat menjadi narasumber Dialog Hallo Kaltim melalui Siaran RRI Samarinda, Rabu (29/4).

Karenanya Jauhar berharap langkah maju yang sudah dilakukan Desa Margo Mulyo bisa memberi inspirasi bagi desa lain di Kaltim. Dia mengharapkan kepala desa lain punya tingkat pemahaman sama agar juga bisa mempercepat proses penyaluran BLT Dana Desa.

Mengingat pemberian BLT dinilai membantu masyarakat dalam mengatasi masa sulit dampak ekonomi COVID-19.

Tentunya didahului mempercepat proses penyaluran Dana Desa tahap I sebesar 40 persen dari total pagu Dana Desa 2020. Mengingat Desa Margo Mulyo bisa menyalurkan BLT Dana Desa karena memang Dana Desa tahap I nya sudah cair.

Bagi desa yang belum cair, dia menyarankan untuk lebih dulu merevisi APBDDesnya menyesuaikan. Sebab sebagaimana diatur dalam Permedes PDTT No6/2020 perubahan Permedes PDTT No11/2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 dalam kondisi luar biasa untuk tiga sektor, yakni untuk desa tanggap COVID-19, Padat Karya Tunai Desa, dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Sementara Perangkat Desa Margo Mulyo, Aden Budiman mengatakan BLT Dana Desa sudah cair untuk 103 KK dengan nilai Rp600ribu perbulan selama tiga bulan mulai April - Juni 2020. Mereka yang ditetapkan sebagai sasaran penerima adalah warga miskin sesuai kriteri yang diatur, kemudian ditetapkan melalui musyawarah desa khusus.

Dia mengaku penyaluran BLT Dana Desa tidak lain karena memang Dana Desa Tahap I sudah cair. Peruntukannya dibagi tiga kegiatan, yakni operasional kegiatan tim relawan seperti untuk pengadaan APD tim relawan, penyemprotan disinfektan jalan dan rumah ibadah, dan pemasangan papan informasi protokol kesehatan.

Kemudian untuk pengadaan APD bagi masyarakat, dan pemberian BLT Dana Desa bagi warga miskin terdampak ekonomi COVID-19.

"Prinsipnya semua program Dana Desa peruntukannya baik pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan desa untuk masyarakat. Jadi sah-sah saja jika dalam kondisi sulit seperti ini diperuntukan untuk membantu masyarakat melalui pemberian BLT Dana Desa," katanya.(DPMPD Kaltim/arf)





DPMPD LEPAS PEJABAT PURNA TUGAS IKUTI PROTOKOL COVID-19

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menggelar pelepasan pejabat purna tugas secara berbeda di masa pandemi COVID-19. Pelepasan dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan berupa physical distancing antar pejabat dan pegawai yang hadir.

Pelepasan dilakukan dalam nunsu sederhana tanpa acara khusus. Didahului rapat terbatas pejabat struktural di lingkungan DPMPD Kaltim, di Ruang Rapat Kantor DPMPD Kaltim, Kamis (30/4). Kemuduain Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy, Isnaini Trikorawati yang memasuki purna tugas per 1 Mei 2020 ini diberi kejutan acara perpisahan.

Satu persatu pejabat yang hadir rapat diawali Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi memberikan pesan dan kesan bagi pejabat yang purna tugas. Kemudian diakhiri dengan pemberian bingkisan dan berfoto bersama.

Pada kesempatan itu, Jauhar mengaku merasa senang dengan kiprah Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy selama mengabdikan di DPMPD Kaltim. Jauhar menilai Isnaini Trikorawati terbilang cepat belajar dan menyesuaikan diri dalam bertugas.

“Termasuk yang cepat belajar. Menurut saya kalau mau sukses harus seperti itu. Jadi pembelajar. Belajar lewat media apa saja. Baik dalam praktek langsung dengan yang lebih berpengalaman, maupun melalui buku dan pembelajaran online,” katanya.

Dia berharap setelah ini tetap terbuka ladang pengabdian di DPMPD Kaltim. Maksudnya tetap dilibatkan sebagai narasumber kegiatan jika kompetensi pembicara yang akan dihadirkan sesuai.

“Ini sudah saya lakukan. Dua kali kegiatan DPMPD menghadirkan mantan Kadispar. Selain memang kita butuh ilmunya, juga sebagai penghargaan kepada mantan pimpinan saat di Biro Humas Setprov Kaltim,” akunya.

Menyikapi itu, Isnaini Trikorawati mengaku bersyukur atas acara pelepasan. Sebab acara terkesan dadakan tanpa diketahuinya sama sekali.

Terlebih ketika melihat hubungan baik antar sesama pegawai di lingkungan DPMPD Kaltim. Dia merasa sangat terkesan bekerja dikelilingi orang baik hati dan berintegritas selama sekitar satu tahun setengah mengabdikan.

“Hubungan ini memberikan semangat mengabdikan dan berkinerja terbaik. Ditambah dorongan pesan motivasi kepala dinas yang selalu disampaikan baik waktu apel pagi, rapat, maupun melalui group WhatsApp,” akunya.

Sedangkan terkait rapat pejabat struktural, Sekretaris DPMPD Kaltim, Surono menyebut lebih pada evaluasi ke dalam terkait rencana kegiatan 2020 dan seperti apa status realisasi anggaran yang sudah dilakukan hingga sekarang.

“Yang jelas karena rasionalisasi anggaran sebesar 50 persen untuk penanganan COVID-19 kita melakukan koreksi terhadap program kegiatan yang sudah ditetapkan. Sisa beberapa bulan kedepan praktis menunggu arahan Sekdaprov terkait kelanjutan program prioritas. Sementara kita fokus melaksanakan kegiatan rutin seperti bayar listrik dan air serta gaji pegawai,” sebutnya.

Pada kesempatan itu juga dibahas soal evaluasi kinerja DPMPD 2020 hasil rapat sidang paripurna DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKJP) Gubernur Kaltim bidang pemberdayaan masyarakat desa

Hasilnya secara keseluruhan kinerja DPMPD Kaltim tahun anggaran 2019 bagus. Ditandai menurunnya jumlah desa berstatus angat tertinggal dan tertinggal di Kaltim dari kondisi awal sebanyak 518 desa.(DPMPD Kaltim/arf)





PELAKSANAAN RAD PG, DPMPD LIBATKAN PERAN PENDAMPING DAN KPM

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur sebagai koordinator pokja III pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) 2019 – 2023 diakui sudah mulai melaksanakan perannya.

Diantaranya melibatkan peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dan Kader Pembangunan Desa (KPM) untuk melaksanakan upaya pencegahan stunting melalui menjaga pola asuh, asih, asah tepat pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Yang sudah kita lakukan melibatkan pendamping untuk memberi informasi dan meberi masukan kepada kepala desa agar dalam perencanaan pembangunan desa memberi prioritas pada bidang kesehatan, khususnya dalam merevitalisasi peran Posyandu dalam upaya meningkatkan pemenuhan gizi anak pada 1.000 HPK,” aku Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan DPMPD Kalimantan Timur, Evida Prasetingrum saat rapat evaluasi RAD PG 2019 -2023 secara virtual, Kamis (14/5).

Pun demikian peran PMD. Membantu meningkatkan pemahaman perangkat desa dan masyarakat desa terkait pentingnya menjaga 1.000 HPK.

Sebagai penunjang, DPMPD mengagendakan beberpa kali pogram pelatihan peningkatan kapasitas KPM seperti yang baru dilakukan di Kabupaten Kutai Barat pada awal tahun 2020.

Menurutnya stunting atau anak kerdil akibat kurang asupan gizi tidak dapat disembuhkan, namun dapat dicegah. Diantaranya dengan langkah pengasuhan yang bisa dilakukan pada masa 1.000 HPK untuk mencegah stunting. Kondisi stunting adalah kondisi ketika seorang anak gagal berkembang akibat kurang gizi kronis sejak dalam kandungan. Periode 1.000 HPK adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai anak lahir 2 tahun pertama kehidupan, merupakan periode emas karena sejak dalam kehamilan salah satunya untuk mencegah Stunting



Dalam menjaga 1.000 HPK kebutuhan dasar tumbuh kembang anak menjadi prioritas utama yakni “asuh-asih-asah” pemberian makan sesuai kebutuhan gizi anak, imunisasi, higiene dan sanitasi, kasih sayang, emosional, stimulasi dan lain-lain.

Termasuk di dalamnya monitoring pertumbuhan dan perkembangan anak dimulai dari dalam keluarga dan pelayanan kesehatan menjadi salah satu cara dalam menjaga 1.000 HPK dari dampak dari gangguan gizi selama masa 1.000 HPK itu sendiri.



DPMPD HALAL BIHALAL VIRTUAL DENGAN TPP SE KALTIM

SAMARINDA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menggelar halal bihalal Idul Fitri 1441 Hijriah dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) se Kaltim yang dilaksanakan secara Virtual, Rabu (27/5).

"Meskipun tidak dilaksanakan secara langsung diharap tidak mengurangi makna silaturahmi DPMPD dengan TPP setelah sekian lama tidak bertemu seiring kebijakan beekerja dari rumah antisipasi penyebaran COVID-19," ujar Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat halal bihalal.

Selain itu, halal bihalal juga sekaligus menjadi ajang koordinasi DPMPD, KPW dengan TPP dalam pelaksanaan tugas pendamping pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD) di Kaltim.

Termasuk memastikan kehadiran TPP dilokasi penugasan setelah cuti bersama Lebaran Idul Fitri kemarin. Karenanya halal bihalal dilaksanakan secara dadakan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk memastikan TPP berada di lokasi penugasan.

Pada rakor tersebut dibahas terkait progres penyaluran dana desa tahun 2020, khususnya tahap I dan tahap II. Dibahas kendala desa-desa yang belum salur dana desa baik tahap I maupun tahap II.

Termasuk dibahas progres penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari dana desa 2020. Diberikan selama tiga bulan dengan besaran Rp600ribu pernah KK perbulan.

Informasi yang disampaikan hampir sebagian besar desa sudah menyalurkan BLT desa tahap I sebesar Rp600ribu, dan sebagian lainnya sudah ada yang salur BLT desa tahap II sebesar Rp600ribu.

Sekalipun tetap masih dijumpai kelambatan proses penyaluran BLT desa yang harus mendapat perhatian bersama.

"Kita berharap dana desa fokus salurkan BLT desa baru yang lain karena sangat dibutuhkan masyarakat. Tidak bisa menunggu Bantuan Sosial Masyarakat (BSM) Provinsi karena nilainya juga lebih kecil dari BLT desa karena jangkauan provinsi luas," timpalnya.(DPMPD Kaltim/arf)





KABUPATEN/KOTA DIMINTA BERINOVASI BUAT KONSEP

PERSIAPAN MENUJU NEW NORMAL



SAMARINDA – Kabupaten/koat se Kaltim diminta berinovasi membuat konsep kebijakan penerapan protokol baru dalam menghadapi penerapan kebijakan new normal atau tatanan hidup baru normal yang produktif dan aman COVID-19.

“Seperti yang dipaparkan empat kota kasus penyebaran COVID-19 berstatus merah yang membuat inovasi dalam menghadapi tatanan baru pada rakor pusat dan daerah kali ini bisa direfleksikan di kabupaten/kota se Kaltim,” sebut Pj Sekprov Kaltim, M Sabani saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan kesiapan wilayah perkotaan menyambut masyarakat produktif dan aman COVID-19, di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (19/6) sore.

Utamanya Kota Surabaya yang membuat konsep secara detail dan sudah mulai menerapkannya dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Diantaranya membuat Mall tangguh, tempat industri tangguh, tempat ibadah tangguh, dan persiapan sekolah tangguh dalam persiapan menuju new normal.

Maksudnya penerapan tatanan baru pada unit-unit dimaksud dengan mempedomani protokol kesehatan yang ditetapkan. Tentunya didukung dengan ketersediaan anggaran memadai dalam pemenuhan sarana prasarana penunjangnya.

Terpenting sepanjang kabupaten/kota mampu menghadapi new normal, maka dinilai perlu dipersiapkan dengan baik sehingga masyarakat bisa beradaptasi sebelum benar-benar diterapkan. Sebab kunci suksesnya ketika masyarakat bisa mengikuti dengan baik protokol kesehatan yang ditetapkan.

“Saya pikir terpenting tiga hal ini yang harus diperhatikan. Menggunakan masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan jangan banyak berinteraksi atau bersentuhan dengan orang,” sebutnya.

Terkait kebijakan pembentukan kampung tangguh sebagai persiapan menuju new normal, Sabani mengaku Kaltim sudah mempersiapkan untuk implementasinya. Sebab sejak awal pandemi COVID-19 semua wilayah hingga tataran RT secara sadar membentuk relawan-relawan tanggap COVID-19 untuk mencegah penyebaran di wilayahnya. “Nah kedepan tinggal dilanjutkan agar lebih intensif lagi,” timpalnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengaku desa-desa di Kaltim sudah membentuk Tim Desa Tanggap COVID-19. Bahkan sudah ada pelatihan membuat aplikasi sederhana untuk mendeteksi orang yang mungkin terpapar COVID-19.

“Terakhir data yang diperoleh per 2 Juni 2020 sudah terbentuk 838 Tim Desa Tanggap COVID-19 dari 841 desa se Kaltim. Relawan yang tergabung mencapai 27.650 orang. Semoga ini bisa menjadi bagian mendukung penerapan new normal jika memang pada saatnya diterapkan di wilayahnya,” katanya. (DPMPD Kaltim/arf)



JAUHAR PAPARKAN

PERAN CAMAT DI ERA COVID-19



SAMARINDA – Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi menjadi salah satu pemateri pada pendidikan dan pelatihan (diklat) secara virtual bagi camat se Kaltim melalui webinar bertema "Strategi Penyiapan Tatanan Normal di sektor ekonomi pada lingkup Kecamatan se Kaltim", Rabu (24/6). Dihadapan camat se Kaltim, Jauhar memaparkan materi tentang peran camat di era COVID-19.

Sesuai PP 17/2018 tentang kecamatan, tugas camat ada empat, yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan tramtibum, dan mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.

Camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati / walikota, yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dan melaksanakan tugas pembantuan.

Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan. Pelayanan Perizinan yang dilimpahkan dengan kriteria, proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks, dan tidak memerlukan teknologi tinggi.

"Di tengah lesunya ekonomi dan persoalan kesehatan akibat dampak pandemi COVID-19, kepada camat, lurah dan kepala desa, diharapkan bisa bangkit dari keterpurukan. Camat memiliki peran sebagai mediator motivator dan fasilitator pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta mampu menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam tatanan normal baru yang produktif dan aman COVID-19," katanya.

Selain itu, camat juga harus bisa mendorong kehidupan masyarakat yang produktif, serta membangkitkan kehidupan ekonomi dengan melakukan inovasi dan berkreasi dalam menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan ditengah pandemi COVID-19 sekarang ini.

Camat harus bisa memberikan motivasi kepada kepala desa/kepala kampung dan lurah bagaimana menggerakkan masyarakat menggunakan cara-cara baru dalam berproduksi. "Seperti tadi yang kita sarankan ya orang jual sayur, jual ikan bisa secara online. Kemudian permodalan ya bisa coba pendekatan dengan bank atau melalui Dana Desa," sebutnya.

Prinsipnya, perlu pendekatan situasional. Bukan berarti tidak konsisten, tapi bagaimana situasi dan kondisi di desa dan kelurahan antara a dan b itu berbeda pendekatannya juga harus berbeda.(DPMPD Kaltim/arf)

**DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN
PEMERINTAHAN
DESA**

Provinsi Kalimantan Timur

**JALAN MT HARYONO NO 96A
IG : DPMPD_KALTIM
WEB : DPMPD.KALTIMPROV.GO.ID**